

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul "Pembatasan Negara – Negara UE-12 dalam Penerapan Kebebasan Gerak Tenaga Kerja di UE-8 yang Baru", bahwasannya penulis melihat belum banyak rekan mahasiswa yang mendalami tentang topik ini. Dan topik yang mengangkat secara lebih rinci pada permasalahan kebebasan gerak pekerja di Uni Eropa belum ada yang membahasnya sebagai judul skripsi.

Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang mempunyai lingkup permasalahan yang luas, dari masalah sosial sampai masalah politik yang ada dan berkembang di masyarakat. Masalah mengenai ketenagakerjaan yang ada di Uni Eropa merupakan suatu peristiwa yang menarik untuk dikupas dari sisi keadaan yang berkejolak di masyarakat Uni Eropa itu sendiri. Suatu pergolakan yang ada di masyarakat UE tersebut dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa sosial politik yang jelas termaktub dalam lingkup Hubungan Internasional.

Uni Eropa yang merupakan suatu perubahan pada tatanan dunia (*world order*) dimana adanya suatu kesepakatan bersama untuk menjadi suatu kesatuan yang mengedepankan keuntungan untuk kemajuan bersama. Dimana dalam UE yang telah menyepakati beberapa persetujuan diantaranya yaitu *Lisbon Agenda* yang berisi mengenai beberapa target yang akan dicapai oleh UE dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan beberapa target yang akan dicapai tersebut, diantara anggota lama (UE 15) terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai ditetapkannya beberapa peraturan untuk anggota baru (UE 10).

Permasalahan tentang ketenagakerjaan yang terjadi di UE merupakan suatu

melatarbelakangi keadaan ini. Melihat kondisi yang demikian sangat pesatnya, penulis mencoba untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk berbagai pihak dimana dalam suatu pengembangan negara ataupun wilayah itu diperlukan berbagai aturan yang mungkin tidak dapat diterima oleh semua pihak. Tetapi dengan adanya aturan yang terencana dan terarah tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi negara yang lebih terencana seperti yang telah ada di UE.

## **B. Tujuan Penulisan**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi<sup>10</sup>, bahwa tujuan penulisan sosial adalah menerangkan suatu fenomena atau peristiwa sosial. Untuk menerangkan peristiwa sosial mengenai kebebasan gerak para pekerja di UE, tentunya penulis memerlukan wacana dan pengetahuan yang memuat fakta-fakta empiris yang penulis ambil dari buku, jurnal, surat kabar ataupun media elektronik seperti internet. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai Uni Eropa khususnya masalah ketenagakerjaan dan efektivitasnya terhadap kemajuan masyarakat yang ada di Uni Eropa.
2. Penulis ingin memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai dampak diterapkannya kebebasan gerak para pekerja di sebagian negara-negara anggota baru UE (UE-8) terhadap masyarakat yang ada di sebagian negara-negara anggota lama UE (UE-12) yang ditetapkan pada Mei 2004.
3. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

---

<sup>10</sup> Singarimbun, M., & Effendi, S. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

### C. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa (UE) adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara yang demokratis di wilayah Eropa yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama. UE bukan merupakan suatu negara yang bermaksud untuk menggantikan keberadaan negara – negara sebelumnya, tetapi UE itu lebih dari sekedar organisasi internasional lainnya. UE dibentuk untuk menciptakan suatu model dari integrasi Eropa yang diharapkan dapat mencegah adanya perang dan perusakan-perusakan yang pernah terjadi.

Organisasi ini pertama kali diusulkan oleh pejabat tinggi di Prancis Robert Schuman pada pidatonya pada tanggal 9 Mei 1950. Pada awalnya UE dianggotai oleh 6 negara di Eropa yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg dan Belanda. Kemudian terjadi perluasan (*enlargement*) dan sekarang ini mempunyai anggota 27 negara. Untuk negara yang merupakan anggota baru dari perluasan ke-5 yang terdiri dari 10 negara yang sering disebut dengan EU-10 (*European Union-10*) yang meliputi negara Cyprus, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia, sedangkan negara-negara anggota lama yang sering disebut dengan EU-15 (*European Union-15*) meliputi 6 negara pendiri ditambah dengan Denmark, Irlandia dan Inggris yang bergabung pada tahun 1973, kemudian Yunani pada tahun 1981 dan Austria, Finlandia dan Swedia yang bergabung pada tahun 1995. Rumania dan Bulgaria yang sebelumnya menjadi usulan, pada 1 Januari 2007 ini sudah resmi menjadi anggota UE. Sebagai usulan negara yang selanjutnya akan bergabung yaitu Turki dan Kroasia.

Anggota lama (UE-15) yang berada di kawasan Eropa Barat ini keadaan ekonominya lebih maju dengan pendapatan perkapita rata – rata diatas 70 persen. Lain halnya dengan 10 negara yang tergabung dalam UE tersebut, 8 diantaranya memiliki pendapatan perkapita sekitar 40 persen

dari rata-rata 15 anggota UE yang telah ada sebelumnya. Sedangkan Cyprus dan Malta berada pada kelompok atas dengan pendapatan perkapita 70 persen dari rata-rata.<sup>11</sup> Hal ini menandakan bahwa keadaan ekonomi di UE-8 masih belum tinggi.

**Tabel 1**  
**Populasi dan Tingkat Ekonomi dari Perluasan UE**

| No | Tahun         | Negara - negara yang disetujui   | Populasi        |                | Kesejahteraan |                   |
|----|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
|    |               |  | Mutlak (1000 s) | Relativ (% UE) | GDP (% UE)    | GDP/kapita (% UE) |
| 1. | 1973<br>EC 9  | Denmark, Irlandia dan Inggris  | 64,227.8        | 30,8           | 21,5          | 69,8              |
| 2. | 1981<br>EC 10 | Yunani   | 9,700.8         | 3,5            | 1,7           | 47,8              |
| 3. | 1986<br>EC 12 | Spainol dan Portugal   | 48,498.9        | 16,7           | 12,3          | 73,4              |
| 4. | 1995<br>EU 15 | Austria, Finlandia dan Swedia  | 29,339.3        | 8,4            | 6,8           | 81,4              |
| 5. | 2004<br>EU 25 | Ciprus, Rep.Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Slovakia, Slovenia dan Polandia | 74.100,0        | 19,5           | 4,8 (a)       | 24,7              |

Sumber: Eurostat (1999; 2004a; 2004b), OECD (various years), (a): 2002

Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan umum yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan UE (*acquis communautaires*).

Dalam proses penyeleksian sebagai anggota UE, negara kandidat harus melewati

<sup>11</sup> *Wajah Baru Uni Eropa dan Tantangan yang Menghadang*, Kompas, 2004, dikutip tanggal 16 November 2006 dari: [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak.htm)

beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Negara-negara UE-10 yang sudah sejak tahun 1995 diusulkan untuk menjadi anggota baru di UE telah mampu melewati proses seleksi yang cukup ketat. Proses seleksi yang dilakukan menghasilkan laporan tetap (*regular report*) pada 9 Oktober 2002, yang mengumumkan bahwa kesepuluh negara yang akan menjadi anggota UE tersebut sudah memenuhi kriteria ekonomi dan *acquis*, dan siap menjadi anggota baru UE pada Mei 2004. Dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahun tersebut, terdapat beberapa kriteria yang terdiri dari 29 bagian (*chapters*) yang harus dipenuhi dan juga bagian-bagian lain mengenai institusi yang sangat banyak.<sup>12</sup>

Setelah adanya keputusan dari komisi UE itu, 10 negara yang akan menjadi anggota baru UE tersebut harus mengatur sedemikian baik negaranya sehingga negaranya akan berjalan lebih maju dan dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, demokratis dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Usulan dari komisi UE tersebut disahkan oleh dewan UE (*European Council*) pada 24 dan 25 Oktober 2002 di Brussel. Kriteria-kriteria yang belum 100 persen terpenuhi harus selalu ditingkatkan dalam pencapaiannya sesuai dengan persetujuan Eropa (*European Agreement*) yang dipertanggungjawabkan dalam Dewan Asosiasi (*Association Council*) tiap tahun sekali, Komite Asosiasi (*Association Committee*) setahun sekali dan Komite Parlemen Kerjasama (*Joint Parliamentary Committee*) setahun dua kali.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan agar negara usulan anggota baru UE benar-benar telah memenuhi standar yang ada.

Sekitar tahun 1990-an, UE yang memiliki penduduk kurang lebih 450 juta ini menjadi suatu kawasan yang mempunyai kebebasan untuk berpindah baik orang, barang, pelayanan maupun uang. Setelah pada 1 Mei 2004 10 negara tersebut

---

<sup>12</sup> *Enlargement of The European Union*, dikutip tanggal 26 Februari 2007, dari [http://www.wikiredia.org/wiki/enlargement\\_of\\_the\\_european\\_union#criteria\\_and\\_methods](http://www.wikiredia.org/wiki/enlargement_of_the_european_union#criteria_and_methods)

<sup>13</sup> [http://www.europa.eu/enlargement/achieving/enlargement\\_process/next\\_enlargements/eu10.htm](http://www.europa.eu/enlargement/achieving/enlargement_process/next_enlargements/eu10.htm) diakses



peraturan tentang ketenagakerjaan yang dilakukan di setiap negara dan hal ini memang harus dicapai oleh pemerintah agar tujuan bersama dapat diwujudkan. Kebijakan yang juga diterapkan di negara anggota baru yang masuk pada 1 Mei 2004 kecuali Siprus dan Malta (UE-8) ini ternyata menimbulkan penolakan diantara negara anggota lama kecuali Inggris, Irlandia dan Swedia (UE-12).

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh petinggi UE untuk merumuskan target – target dan juga strategi yang akan ditempuh UE merupakan suatu usaha untuk menyamakan tujuan bersama. Pada tahun 1997 di Luxembourg diadakan suatu pertemuan untuk menentukan strategi dalam penanganan masalah ketenagakerjaan ini. Ada 3 hal yang dihasilkan dalam pertemuan itu, yaitu pencapaian kerja secara menyeluruh, peningkatan produktivitas dan kualitas kerja dan peningkatan kebersamaan. Tiga hal yang merupakan pengharapan dari para elite di UE ini sangatlah bergantung pada partisipasi dari masyarakat UE itu sendiri. Untuk pencapaian tiga hal yang sudah ditetapkan tersebut, wakil-wakil dari negara anggota UE menerapkan suatu target yang sering disebut “*Lisbon Strategy*”<sup>14</sup> yang isinya:

**Tabel 2**  
**Strategi Lisbon tentang Ketenagakerjaan**

| No. | Target Khusus       | Persentase   |
|-----|---------------------|--------------|
| 1.  | Pekerja             | 70 %*        |
| 2.  | Pekerja Wanita      | 60 %*        |
| 3.  | Pekerja Lanjut Usia | 50%*         |
| 4.  | Pertumbuhan Ekonomi | 3% per tahun |

*Ket: (\*) Persentase pekerja yang akan dicapai tahun 2010*





#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat pertanyaan sebagai berikut:

“Mengapa terjadi pembatasan dari negara UE-12 untuk penetapan kebebasan gerak pekerja (*free labour movement*) bagi pekerja dari negara UE-8 yang baru, padahal sebagai negara anggota Uni Eropa, 8 negara baru tersebut berhak menerima kebebasan gerak tenaga kerja?”

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Uni Eropa, akan digunakan konsep integrasi. Kerangka pemikiran tersebut diharapkan bisa menjelaskan adanya pembatasan yang terjadi di EU-15 terhadap pemberlakuan kebebasan pekerja (*free labour movement*) di negara-negara EU-8.

#### **Konsep Integrasi<sup>15</sup>**

Integrasi didefinisikan sebagai sarana “membentuk bagian-bagian menjadi suatu kesatuan”. Integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses mewujudkan identitas nasional di dalam suatu kumpulan yang terpisah dari segi budaya, sosial dan lokasi yang bersatu dalam suatu unit politik.<sup>16</sup> Dalam masalah ini, perlu adanya suatu pengukuran terhadap konsep integrasi yang digunakan oleh Uni Eropa dalam pencapaian tujuannya. Untuk mengukur hal ini digunakan suatu pengkhususan suatu bidang yang berkaitan dengan Uni Eropa. Hal itu adalah Integrasi Ekonomi, Integrasi Sosial dan Integrasi Politik.

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 2004, hal: 7-11

Integrasi ekonomi yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur integrasi. Menurut Nye, dalam integrasi ekonomi ini penekanannya lebih kepada efek politik dari interdependensi ekonomi terhadap hubungan antara negara – negara berdaulat. Hal tersebut memunculkan suatu hipotesa bahwa perilaku negara – negara yang saling berintegrasi terhadap sesama anggota akan lebih bersifat damai. Dengan kata lain, sistem internasional yang terintegrasi pada umumnya lebih damai. Hal ini terjadi di UE karena adanya interdependensi perdagangan diantara negara – negara anggota UE yang berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara.

Indikator sosial ini menunjuk pada pertumbuhan komunikasi dan transaksi (seperti perdagangan, surat – menyurat, pariwisata, dan sebagainya) yang melintas batas nasional. Hasilnya, yang berwujud jaringan hubungan antar unit – unit non-pemerintah, adalah suatu masyarakat transnasional. UE yang merupakan suatu kesatuan itu bisa dianggap sebagai integrasi sosial karena keadaan yang ada di UE sekarang ini menandakan adanya perdagangan, komunikasi antar individu – individu ataupun kelompok antar negara terjalin. Sehingga adanya identitas “orang Eropa” telah timbul diantara masyarakatnya.

Integrasi politik ini mempunyai suatu indikator untuk untuk bisa menjelaskan adanya fenomena politik. Dalam kaitan ini Joseph Nye mengajukan konsep “sistem politik transnasional” dengan ciri-ciri:

1. Memiliki beberapa struktur institusional walaupun sederhana;
2. Terdapat interdependensi dalam perumusan kebijaksanaan;
3. Terdapat perasaan identitas yang sama dan kewajiban timbal-balik.

Hal ini akan dijelaskan dalam empat ruang lingkup yang termasuk didalamnya adalah tiga indikator yang dikemukakan oleh Nye. Yang *pertama* adalah integrasi

... dan ...

yurisdiksional. Secara konkret, yurisdiksi supranasional berarti tiga wewenang baru, yaitu: 1. hubungan langsung dengan individu – individu di dalam negara-negara anggota; 2. wewenang untuk menarik pajak, meminjam dan meminjami uang; dan 3. voting mayoritas oleh wakil-wakil negara anggota.

Yang *kedua* yaitu integrasi kebijakan dimana dalam integrasi ini terdapat suatu penilaian tingkat dari integrasi yang dapat menentukan akomodasi yang dilakukan oleh setiap negara anggota dalam perumusan kebijaksanaan untuk semua wilayah negara-negara anggota. Dalam hal ini dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja negara-negara anggota dalam penanganan jumlah dan tingkat kepentingan dari kebijakan yang ditetapkan. Dalam Uni Eropa terdapat berbagai kebijakan yang akan ditetapkan terhadap negara-negara anggota baru yang bergabung didalamnya. Kebijakan-kebijakan itu lebih kepada prinsip *Single European Market*, yang memiliki 4 pilar di dalamnya yaitu: pergerakan bebas pada barang, orang, pelayanan dan modal (*Free movement of goods, persons, services and capital*) diantara negara-negara anggota Uni Eropa.<sup>17</sup> Kebebasan gerak para pekerja yang merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan bersama seharusnya juga bisa diterapkan di negara – negara anggota UE baru (UE-10). Dalam proses penerapan kebijakan yang sudah disepakati itu menurut Josep Nye, hal ini merupakan suatu keharusan dimana dapat mengukur suatu integritas yang ada di UE. Dengan kata lain bahwa UE dapat disebut suatu integritas karena adanya berbagai kesepakatan kebijakan yang telah disetujui oleh negara-negara anggota UE.

Dengan mempunyai suatu kesepakatan bersama dalam menjalankan kebijakan yang ada, seharusnya semua negara-negara yang tergabung dalam UE bisa saling menerima satu sama lain untuk tujuan utama UE yaitu kemakmuran bersama.

---

<sup>17</sup> Josep Nye, *The New Realism*, Cambridge University Press, 1990, p. 100.

Banyak dari anggota lama kecuali Inggris, Irlandia dan Swedia yang khawatir untuk menghapus pelarangan terhadap pekerja dari EU-10 karena mereka beranggapan bahwa jika hal ini tidak dilakukan maka akan menambah masalah bagi negaranya. Adanya semacam kekhawatiran terhadap kedatangan orang asing di negeri sendiri (*xenophobia*) terjadi setelah perluasan (*enlargement*) yang ke lima ini.<sup>18</sup>

Yang *ketiga* yaitu mengenai integrasi sikap dimana kelompok-kelompok politik tersebut tidak hanya berinteraksi atau sama-sama memiliki integrasi tersebut tetapi juga mengembangkan perasaan seidentitas dan perasaan kewajiban timbal balik. Hal ini dapat dilihat pada sikap Inggris, Irlandia dan swedia yang bersedia membuka pintu bagi tenaga kerja yang berasal dari 10 negara anggota baru. Beberapa hal yang membuktikan bahwa dengan membuka pintu tenaga kerja tersebut tidak akan merubah kondisi tenaga kerja yang ada di wilayah asal. Menurut seorang penulis Patrick Weil bahwa seperti yang terjadi di tiga negara yang pro terhadap pasar tenaga kerja tersebut bahwa dengan pengaturan yang terencana hal tersebut bisa disusun dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak.<sup>19</sup> Sikap yang saling menguntungkan ini menandakan adanya integrasi Eropa yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bersama

Yang *keempat*, menurut Karl Deutsch bahwa integrasi politik itu juga menggunakan konsep *security-community* yaitu suasana dimana masing-masing negara mengharapkan hubungan tanpa kekerasan. Memang dalam hal ini sulit digunakan suatu pengukuran karena kita tidak tahu apakah suatu negara itu merencanakan perang melawan negara lain atau tidak, tetapi konsep ini sangat penting diterapkan ketika negara-negara tersebut membentuk suatu integritas yang tentunya untuk kepentingan bersama. Sama halnya dengan pembentukan UE yang

---

<sup>18</sup> *Wajah Baru Uni Eropa dan Tantangan yang Menghadang*, op.cit.

secara jelas menginginkan adanya kemakmuran secara menyeluruh diantara Negara-negara anggotanya dengan ditambah situasi dan kondisi yang aman.

Perluasan yang dilakukan oleh UE ini merupakan suatu diharapkan menjadi suatu usaha untuk menghilangkan pembagian Eropa yang masih bercokol setelah perang dingin usai, dan diharapkan akan meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Eropa. Jadi dengan integritas yang dimiliki Eropa saat ini diharapkan negara – negara anggota baru tersebut tidak kembali kepada pemerintahan yang otoriter. Menurut komisi Eropa bahwa perluasan ke timur ini berarti pertumbuhan ekonomi UE-15 akan meningkat dengan 0,5-0,7 persen setahun.<sup>20</sup> Negara-negara lama dan baru harus mencapai suatu persetujuan mengenai pembiayaan UE dan seluru kesepakatan yang telah diputuskan untuk masa depan UE yang mencerminkan politik integrasi eropa yang sesuai dengan pola prinsip solidaritas UE.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran diatas, maka ditarik hipotesa sebagai kesimpulan sementara bahwa penyebab adanya penolakan di negara-negara UE-12 tentang penetapan kebebasan gerak para pekerja di UE-8 yang baru yaitu:

Negara – negara UE-12 yang menolak adanya pemberlakuan kebebasan gerak para pekerja di UE-8 itu dikarenakan adanya:

##### **1. Internal UE-8**

- a. Aspek ekonomi yang belum stabil yang menyangkut tenaga kerja, produksi dan modal
- b. Aspek politik terjadi ketimpangan yang menyangkut situasi politik yang belum stabil

## 2. Internal UE-12

- a. Aspek sosial ekonomi yang melambangkan adanya supranasional belum terlaksana sepenuhnya

### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulisan ini memerlukan batasan. Masalah Uni Eropa ini merupakan unit analisa pada level Regional dan penelitian ini akan memfokuskan pada penyebab terjadinya pembatasan di negara - negara UE-12 terhadap penetapan kebebasan gerak para pekerja di UE-8 dan lebih lanjut akan fokus pada setelah masuknya 10 anggota baru di Uni Eropa (UE-10) pada Mei 2004 sampai dengan tahun 2006 dimana perjanjian transisi "2+3+2" tahun untuk etape pertama dilakukan.

Namun ada kemungkinan penulis sedikit menyinggung masalah diluar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori maupun pendekatan kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah ilmiah dan surat kabar. Sedangkan data – data lain diperoleh dari media elektronik

sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiahnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut:

**BAB I**, adalah pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka dasar penulisan

**BAB II**, memaparkan tentang dinamika pembentukan Uni Eropa yang dijelaskan ketika sebelum adanya perluasan ke Timur yang merupakan proses awal pembentukan Uni Eropa kemudian dilanjutkan dengan proses setelah perluasan ke Timur yaitu pada 1 Mei 2004 dimana terdapat 10 negara anggota baru yang berasal dari Eropa Tengah dan Timur masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

**BAB III**, menjelaskan tentang integrasi yang ada di UE baik dalam hal ekonomi, sosial maupun politik dan kebebasan gerak para pekerja (*free labour movement*) yang ditetapkan di Uni Eropa sebagai suatu *fundamental freedom*.

**BAB IV**, membahas tentang penyebab terjadinya ketidakseimbangan integrasi di UE dalam penetapan kebebasan gerak para pekerja (*free labour movement*) yaitu pada saat adanya pembatasan negara-negara UE-12 terhadap kebebasan gerak tenaga kerja dari UE-8.